

Volume 1 Nomor 1 April 2016

ISSN 2443-3918

# Jurnal Membaca

BAHASA & SAstra INDONESIA

BAHASA  
SA

---

Diterbitkan oleh  
MLI Cabang Untirta dan HISKI Banten

---

# Daftar Isi

INTERFERENSI BAHASA DAERAH TERHADAP BAHASA INDONESIA LISAN MASYARAKAT KABUPATEN SERANG PROVINSI BANTEN	1
<b>Asep Muhyidin</b>	
BAHASA INDONESIA DAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN DI BANTEN	11
<b>Dase Erwin Juansah</b>	
MENCERMATI BENTUK INFLEKSIDAN DERIVASI DALAM BAHASA INDONESIA	21
<b>Diana Tustiantina</b>	
KESANTUNAN BERBAHASA DALAM TINDAK TUTUR YANG BERORIENTASI PADA KEARIFAN LOKAL ANTARA BANTEN DAN MINANGKABAU SEBAGAI PENDIDIKAN KARAKTER	33
<b>Ediwarman</b>	
IDENTITAS DALAM NOVEL MARYAM KARYA OKKY MADASARI	39
<b>Eka Ugi Sutikno dan Ahmad Supena</b>	
PEMBACAAN SEMIOTIK TERHADAP PUISI “LAGU DARI POJOK JALANAN” KARYA SONI FARID MAULANA (KAJIAN SEMIOTIK RIFFATERRE)	59
<b>Eri Rahmawati</b>	
ALIH KODE DAN CAMPUR KODE PADA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA SEKOLAH MENEGAH DI KOTA SERANG	69
<b>Erwin Salpa Riansi</b>	
NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM NOVEL LUKISAN KARYA GOLA GONG (KAJIAN STRUKTURALISME DINAMIK)	77
<b>Ilmi Solihat</b>	
IDEOLOGI MASKULINITAS DALAM IKLAN MEN’S BIORE DOUBLE SCRUB: SEBUAH KAJIAN KRITIS	87
<b>Lela Nurfarida</b>	
KESETIAAN YANG KERAS	99
<b>Arip Senjaya</b>	



## BAHASA INDONESIA DAN DAERAH DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN DI BANTEN

**Dase Erwin Juansah**

Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Untirta

daseerwin@yahoo.com

### Abstract

Indonesian Language has two positions, namely as the national language and the language of the State. In his position as the national language, Indonesian Language serves as a symbol of national pride, a symbol of national identity and as a means of communication between peoples, inter-region and inter-tribe. Meanwhile, as the language of the state serves as the language of instruction in educational institutions, official state language, national culture of developer tools, science and technology. The Political Language Seminar in 2000 decided that the position of regional languages serve as a symbol of regional pride, regional identity and local community relations. The presence of Indonesian and regional languages at the present time has begun to erode in the presence of a foreign language. At least, the language users are no longer using language appropriate to the place and the circumstances. Sometimes in a formal situation, people are using foreign languages or regional languages, although the situation is demanding to use Indonesian. The same thing happened in the context of education in Banten province, the vast majority of students and educators in the teaching and learning process in the classroom often use or mix the language with the local language in Indonesian or foreign language. One of the factors that caused the decline in the vitality of Indonesian Language in society and in educational institutions is the linguistic competence of the speakers, thus when doing communication, they mix or even leave Indonesian Language.

**Key words:** Language, language vitality, education

### PENGANTAR

Sudah 88 tahun berlalu atau tepatnya 28 Oktober 1928, para pemuda di nusantara mengikrarkan sumpah yang merupakan suatu kebulatan tekad para pemuda untuk menyatukan satu visi perjuangan yang bersifat nasional dalam rangka menuju kemerdekaan. Kebulatan tekad para pemuda saat itu dilandasi karena perjuangan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan sehingga cenderung lebih mudah untuk dipecah belah oleh para penjajah. Akhirnya, melalui perjuangan yang panjang tercetuslah Sumpah Pemuda. Se-

kadar mengingat kembalidan juga dalam upaya menggugah serta menumbuhkan sikap masyarakat Indonesia dan Banten secara khusus terhadap bahasa Indonesia, penulis kutip petikan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 sebagai berikut.

*Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia  
Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia  
Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia*

Berkaitan dengan naskah Sumpah Pemuda tersebut, Halim (1980:2-3) menyatakan bahwa terdapat dua konsep dasar yang berupa *pengakuan* dan *pernyataan tekad*. *Pengakuan pertama*, bahwa pulau-pulau yang bersebaran dan lautan yang menghubungkan pulau-pulau yang merupakan wilayah Republik Indonesia adalah satu kesatuan tumpah darah yang disebut *Tanah Air Indonesia*. *Pengakuan kedua*, bahwa manusia-manusia yang menempati bumi Indonesia itu juga merupakan satu kesatuan yang disebut *bangsa Indonesia*. Sementara itu, pernyataan ketiga tidak merupakan pengakuan “berbahasa satu”, tetapi merupakan *pernyataan tekad kebahasaan* yang menyatakan bahwa kita bangsa Indonesia, *menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia*.

Merujuk pada penjelasan tersebut, mengenai *pengakuan pertama* yang menyatakan bertanah air satu, tanah air Indonesia maka seharusnya tidak lagi kita mendengar mengenai kerusuhan oleh kelompok-kelompok tertentu di suatu daerah, seperti Gerakan Aceh Merdeka (GAM), pemberontakan di Papua, yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan alasan tidak diperhatikan oleh pemerintahan Indonesia, dianaktirikan, dan berbagai alasan yang lain jika semua komponen masyarakat Indonesia menyadari dan mengakui bahwa pulau-pulau yang bersebaran dari Sumatera sampai Papua, daerah yang berbeda-beda adalah satu kesatuan yaitu tanah air Indonesia. Dengan kesadaran dan pengakuan tersebut, idealnya masyarakat Indonesia tidak lagi melihat suatu perbedaan berdasarkan daerah atau suku, tetapi harus saling bahu-membahu dan berpegangan erat dalam upaya membina kesatuan dan persatuan tanah air ini.

Sementara itu, mengenai *pengakuan kedua*, yang berbunyi berbangsa satu, bangsa Indonesia maka seharusnya kita tidak lagi mendengar atau melihat di tayangan televisi kerusuhan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia hanya karena perbedaan suku bangsa atau daerah. Menilik ke belakang, dulu

kita mendengar terjadi kerusuhan di Kalimantan antara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang lain yang hanya disebabkan masalah sepele. Atau, kejadian yang baru-baru ini muncul, misalnya di Lampung tepatnya di daerah Mesuji, terjadi kerusuhan antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Itupun dipicu hanya karena kesalahpahaman dari kedua belah pihak. Hal tersebut seperti yang penulis paparkan di atas, tidak akan terjadi jika semua masyarakat Indonesia menyadari bahwa mereka (baca: suku bangsa) walaupun berbeda-beda daerah atau wilayah merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia. Adapun mengenai *pernyataan ketiga*, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hal ini menggarisbawahi bahwa hanya ada satu bahasa yang menjadi alat pemersatu dan alat perhubungan antardaerah dan antarsuku bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Dengan demikian, tidak ada lagi bahasa yang bisa menjembatani perbedaan suku bangsa atau daerah selain bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia idealnya harus dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan kedudukannya di atas bahasa daerahnya masing-masing.

Berkaitan dengan judul yang penulis tulis dan paparan di atas, ada pertanyaan besar yang menurut hemat penulis patut dipertanyakan kembali terhadap bangsa ini, yaitu bagaimana rasa kebangsaan kita terhadap negara ini dan bagaimana kebanggaan kita terhadap bahasa Indonesia?

Pengakuan berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia, dan berbahasa satu bahasa Indonesia. Mulai sejak itulah, perjuangan dan pergerakan pemuda sudah tidak lagi bersifat kedaerahan, tetapi bersifat nasional apalagi mereka menyepakati bahasa yang dijadikan sebagai alat komunikasi dan alat persatuan para pemuda pada saat itu bahasa Indonesia. Agaknya terlalu naif ketika berbicara tentang profil pendidikan bahasa Indonesia dan bahasa daerah tanpa membahas mengenai asal-usul bahasa

Indonesia, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dan bahasa daerah, serta peta penyebaran dan pemakaian bahasa Indonesia dan bahasa daerah berdasarkan wilayah dan penuturnya. Demikian pula dengan pemakaian bahasa Indonesia dan bahasa daerah di lingkungan sekolah di wilayah Provinsi Banten.

## SEJARAH PERKEMBANGAN BAHASA INDONESIA

Berbicara mengenai asal-usul bahasa Indonesia, sepertinya terlalu sederhana jika kita hanya mengatakan bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu tanpa mengetahui sejarah perkembangannya. Bahasa Melayu pada masa lampau merupakan salah satu dialek yang tersebar di wilayah nusantara dan sudah menjadi bahasa percakapan/bahasa sehari-hari (*lingua franca*) yang dipakai oleh masyarakat nusantara pada masa itu.

Berdasarkan catatan dari beberapa literatur mengenai bahasa Melayu, setidaknya diketahui bahwa bahasa Melayu sudah dipakai sebagai alat komunikasi pada zaman kerajaan Sriwijaya. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya beberapa prasasti, antara lain Prasasti Kedukan Bukit di Palembang (683M), Prasasti Talang Tuo di Palembang (684M), Prasasti Kota Kapur (686M) di Bangka Barat, Prasasti Karang Brahi (688) yang ditemukan antara Jambi dan sungai Musi (Arifin, 2004 :3).

Selain ditemukan di wilayah Sumatra dan sekitarnya, di Pulau Jawa juga ditemukan beberapa prasasti yang bertuliskan dalam bahasa Melayu, antara lain prasasti Gandasuli (832M) di daerah Kedu, Jawa Tengah. Selain itu, juga ditemukan Prasasti Bogor (942M) Jawa Barat. Kedua prasasti di pulau Jawa tersebut memperkuat dugaan kita bahwa bahasa Melayu kuno pada masa itu bukan hanya dipakai di pulau Sumatera, melainkan di pulau Jawa juga dipakai oleh masyarakat untuk kepentingan komunikasi dengan sesamanya (Arifin, 2004:3).

Dalam penjelasan selanjutnya, Arifin (2004:5) menjelaskan bahwa pada masa zaman

kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu berfungsi sebagai berikut.

1. Sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku-buku yang berisi aturan-aturan hidup dan sastra.
2. Sebagai bahasa perhubungan (*lingua franca*) antarsuku di Indonesia.
3. Sebagai bahasa perdagangan, terutama di sepanjang pantai, baik bagi suku yang ada di Indonesia maupun bagi pedagang-pedagang yang datang dari luar Indonesia.
4. Sebagai bahasa resmi kerajaan.

Seiring dengan perkembangan zaman, perlahan-lahan tetapi pasti, bahasa Melayu berkembang dan tumbuh terus sehingga pemakaiannya meluas hampir ke seluruh wilayah nusantara tidak hanya terpaku di kepulauan Sumatra dan Jawa saja. Hal ini didasari karena bahasa Melayu dijadikan sebagai alat komunikasi masyarakat nusantara pada masa tersebut sehingga cenderung memudahkan para pemakainya dari berbagai pulau di nusantara.

Sebagai puncak dari perkembangan bahasa Melayu, terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda Indonesia dan tokoh-tokoh pergerakan pada saat itu, dengan penuh kesadaran kebangsaan dalam rangka mempersatukan suku-suku bangsa Indonesia dipandang perlu suatu bahasa yang bersifat universal dan nasional sehingga akhirnya mereka (baca: pemuda dan tokoh pergerakan) bersepakat atas bantuan Dewan Rakyat akhirnya mengikrarkan *Sumpah Pemuda* yang berisi: *pengakuan pertama* bahwa pulau-pulau yang bertebaran dan lautan yang menghubungkan pulau-pulau yang merupakan wilayah Republik Indonesia adalah satu kesatuan tumpah darah yang disebut *Tanah Air Indonesia*. *Pengakuan kedua*, bahwa manusia-manusia yang menempati bumi Indonesia itu juga merupakan satu kesatuan yang disebut *Bangsa Indonesia*. Sementara itu, pernyataan ketiga tidak merupakan pengakuan “berbahasa satu”, tetapi merupakan *pernyataan tekad kebahasaan* yang menyatakan bahwa kita bangsa Indonesia, *menjunjung*

<http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jurnalmembaca>

*tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia* (Halim, 1980 : 2-3).

Terdapat beberapa alasan mengapa bahasa Melayu yang dijadikan landasan menjadi bahasa Indonesia, antara lain sebagai berikut.

1. Bahasa Melayu sudah merupakan *lingua franca* di Indonesia, bahasa perhubungan, dan bahasa perdagangan.
2. Sistem bahasa melayu sederhana, mudah dipelajari karena bahasa melayu tidak mengenal tingkatan berbahasa seperti bahasa Jawa dan bahasa Sunda.
3. Suku Jawa, Sunda, dan suku-suku yang lain dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional
4. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas (Arifin, 2004 : 5-6).

#### **KEDUDUKAN FUNGSI BAHASA INDONESIA DAN BAHASA DAERAH**

##### 1. Kedudukan Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, seperti tercantum dalam ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi *Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia*. Hal ini menandakan bahwa bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional; kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Selain itu, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pasal khusus (Bab XV, pasal 36) mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia (Tim MKU Bahasa Indonesia, 2006:17). Berdasarkan dua hal di atas, dapat dipahami bahwa bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan, sebagai *bahasa nasional* berdasarkan Sumpah Pemuda 1928 dan sebagai *bahasa negara* berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Bab XV pasal 36.

##### 2. Fungsi Bahasa Indonesia

Berbicara tentang fungsi bahasa Indonesia maka akan selalu berkaitan dengan ke-

dudukan bahasa Indonesia itu sendiri. Di dalam kedudukannya sebagai *bahasa nasional*, bahasa Indonesia berfungsi sebagai (1) *lambang kebanggaan kebangsaan*, artinya bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita, (2) *lambang identitas nasional*, artinya bahasa Indonesia menjadi identitas/ciri seperti halnya bendera dan lambang negara dihadapan bangsa-bangsa yang lain, (3) *sebagai alat perhubungan antarwarga, antardaerah, dan antar-suku bangsa*, artinya bahasa Indonesia menjadi alat perhubungan/komunikasi bagi seluruh rakyat Indonesia, dan (4) alat yang memungkinkan terlaksananya penyatuan berbagai suku bangsa yang memiliki latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda-beda ke dalam satu kesatuan kebangsaan yang bulat.

Sementara itu, dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi: (1) *bahasa resmi kenegaraan*, artinya bahasa Indonesia dipakai dalam acara resmi kenegaraan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan, (2) *bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan*, artinya bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan mulai taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi, (3) *alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional dan untuk kepentingan pelaksanaan pemerintahan*, dan (4) alat pengembang kebudayaan nasional, ilmu pengetahuan, dan teknologi (Arifin, 2004:11-12).

##### 3. Fungsi Bahasa Daerah

Salah satu keputusan yang bersifat politis yang dihasilkan Seminar Politik Bahasa tahun 2000 adalah ditentukan fungsi bahasa daerah sebagai: (a) lambang kebanggaan daerah, (b) lambang identitas daerah, (c) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, (d) sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia, (e) pendukung sastra daerah dan sastra Indonesia. Selain itu, dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia, bahasa

daerah berfungsi sebagai: (a) pendukung bahasa nasional, (b) bahasa pengantar di sekolah dasar di daerah tertentu pada tingkat permulaan untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain, dan (c) sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia, serta (d) dalam keadaan tertentu dapat berfungsi sebagai pelengkap bahasa Indonesia di dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tingkat daerah (Alwi dan Dendy Soegono (2000) dalam Mahsun (2004)).

Merujuk pada paparan di atas, ada kecenderungan bahasa daerah diperhatikan setelah pembinaan terhadap bahasa Indonesia semakin masif. Dalam konsep tersebut, bahasa daerah tetap dipertahankan oleh penuturnya pada tataran komunikasi antar-masyarakat daerah dan di dalam keluarga, sebagai pemerkaya khazanah bahasa Indonesia. Hal ini semakin diperjelas dengan adanya otonomi daerah, yang didalamnya terutang wewenang dan kreativitas para pemimpin daerah untuk membuat kebijakan mengenai bahasa dan perencanaan bahasa daerah di masing-masing daerah.

### **KEANEKARAGAMAN BAHASA DI INDONESIA**

Harding dan Riley menyatakan bahwa lebih setengah penduduk dunia adalah dwibahasawan (Tarigan, 1995:2). Hal ini berarti bahwa sebagian besar manusia di bumi ini menggunakan dua bahasa atau lebih sebagai alat komunikasi. Kenyataan ini juga berlaku sama pada masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia pada umumnya termasuk masyarakat yang menguasai lebih dari satu bahasa. Hampir semua suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa ibu atau bahasa pertama (B-1), bahasa daerah. Disamping itu, mereka pun menguasai pula bahasa kedua (B-2), yaitu bahasa Indonesia atau bahasa asing. Di beberapa daerah, misalnya di daerah kawasan wisata, bahasa kedua bagi masyarakat bukan bahasa Indonesia, melainkan

bahasa daerah dari suku bangsa lain atau bahkan bahasa Asing. Bahasa Indonesia merupakan bahasa ketiga. Bahkan, kelompok masyarakat Indonesia yang terpelajar dapat menguasai lebih dari dua atau tiga bahasa, yaitu bahasa daerah, bahasa daerah dari suku lain, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Dengan demikian, masyarakat di Indonesia dapat dikelompokkan sebagai masyarakat yang dwibahasawan bahkan multibahasawan.

Masyarakat bilingual atau multilingual yang menguasai lebih dari satu bahasa akan melakukan peristiwa kontak bahasa. Kontak bahasa itu terjadi antara bahasa yang satu dan bahasa yang lain. Akibat dari peristiwa kontak bahasa itu akan timbul dua hal, yaitu yang menguntungkan dan yang merugikan. Hal yang menguntungkan, yaitu integrasi. Menurut Haugen (1972:277) integrasi adalah kebiasaan memakai materi dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Sementara itu, kontak bahasa yang sifatnya negatif, yaitu interferensi. Menurut Weinreich (1970:1), interferensi adalah penyimpangan dari norma bahasa dalam bahasa yang digunakan sebagai akibat pengenalan terhadap bahasa lain.

Bahasa sebagai salah satu unsur kebudayaan tidak terlepas pula dari kemajemukannya. Di Indonesia dikenal bahasa Indonesia dan beraneka ragam bahasa daerah. Bahasa daerah digunakan sebagai alat komunikasi antarsuku bangsa itu sendiri, sedangkan untuk berkomunikasi dengan suku bangsa yang lainnya digunakan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa.

Kenyataan tersebut adalah hikmah yang luar biasa besarnya bagi bangsa Indonesia. Bangsa kita menjadi bangsa yang besar dengan potensi budaya dan sosial yang beragam. Setiap kelompok budaya dalam masyarakat kita adalah kelompok etnis dengan kekayaan tradisi masing-masing. Berkah berikutnya yang harus disyukuri bahwa ternyata keberagaman dan kemajemukan tersebut tidak sampai menimbulkan permasalahan sosial, budaya, dan bahasa

secara horizontal. Padahal, di negara-negara lain kemajemukan ternyata menimbulkan persoalan tersendiri. Misalnya, India dan Filipina yang mengalami masalah ketika akan memilih bahasa mana yang akan dijadikan bahasa nasional.

Keadaan sosiolinguistik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam kebudayaan dan bahasanya itu sangat memungkinkan terjadinya suatu gejala penguasaan dua bahasa atau lebih bagi penduduknya. Menguasai bahasa sukunya sendiri dan bahasa nasional atau bahasa sukunya sendiri, bahasa nasional, dan bahasa suku yang lain. Bahkan, melalui pendidikan formal anak-anak pun diperkenalkan dengan bahasa asing. Dengan kata lain, kondisi sosiolinguistik di Indonesia telah mengondisikan munculnya gejala kedwibahasaan.

Adanya kedwibahasaan yang terjadi pada masyarakat tutur kemungkinan besar akan berakibat pada munculnya kontak antara bahasa yang satu dan bahasa yang lain, yang akhirnya dapat saling memengaruhi. Antara bahasa Indonesia dan bahasa daerah telah terjadi kontak sosial dan budaya yang aktif. Jiwa bahasa Indonesia dan bahasa daerah telah bersatu, kedua bahasa yang bersangkutan mulai saling memerhatikan, akhirnya saling memengaruhi. Melihat keadaan kebahasaan yang demikian itu, maka jelaslah bahwa kedwibahasaan merupakan kenyataan dalam masyarakat Indonesia. Bahkan, mungkin pula yang terjadi di masyarakat tidak hanya berupa kedwibahasaan saja, tetapi kemultibahasaan sebab kadang-kadang selain menguasai bahasa Indonesia dan bahasa daerah sendiri, juga menguasai satu, dua bahasa daerah yang lain atau mungkin bahasa asing karena tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sehubungan dengan kontak bahasa, Mackey menyatakan kontak bahasa adalah pengaruh bahasa yang satu kepada bahasa yang lain, baik langsung maupun tidak langsung sehingga menimbulkan perubahan-perubahan yang dimiliki oleh ekabahasaan. Menurut pendapatnya, kontak bahasa cen-

derung kepada gejala bahasa (*langue*), sedangkan kedwibahasaan lebih cenderung sebagai gejala tutur (*parole*). Namun, karena *langue* pada hakikatnya adalah sumber dari *parole*, kontak bahasa sudah selayaknya tampak dalam kedwibahasaan. Atau dengan kata lain, kedwibahasaan terjadi sebagai akibat adanya kontak bahasa yang dilakukan pemakai bahasa (Suwito, 1983:39).

Persoalan bilingualisme dan multilingualisme serta kontak bahasa terjadi juga di masyarakat Banten. Secara umum masyarakat Banten adalah masyarakat yang heterogen, baik secara sosial, budaya, maupun bahasa. Secara sosial, masyarakat Banten terbagi ke dalam beberapa tingkatan sosial, antara lain berdasarkan tingkat pendidikan, muncul istilah masyarakat yang tidak berpendidikan, masyarakat yang berpendidikan rendah, masyarakat yang berpendidikan sedang/menengah, dan masyarakat yang berpendidikan tinggi. Berdasarkan tingkatan ekonomi, dihasilkan masyarakat ekonomi rendah, menengah dan masyarakat ekonomi tinggi. Kenyataan di atas berdampak pada kegiatan pemilihan dan pemakaian bahasa yang berbeda-beda di masyarakat Banten.

Sementara itu, heterogenitas masyarakat Banten berdasarkan tinjauan bahasa, selain bahasa Indonesia yang tumbuh dan berkembang, di masyarakat Banten dikenal beberapa bahasa daerah yang dipakai sebagai alat komunikasi di masing-masing daerahnya, sedangkan untuk komunikasi antardaerah biasanya mereka (baca: masyarakat Banten) menggunakan bahasa Indonesia. Di Banten dikenal beberapa bahasa daerah yang tumbuh dan berkembang serta menyokong perkembangan bahasa Indonesia, antara lain bahasa Jawa digunakan oleh masyarakat Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kabupaten Serang. Bahasa Sunda digunakan oleh sebagian besar masyarakat di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, dan bahasa Indonesia dialek Betawi dipakai oleh masyarakat Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan sebagian Kabu-

paten Tangerang. Melihat kenyataan di atas, dengan demikian dapat dikatakan masyarakat Banten adalah masyarakat yang bilingual atau bahkan multilingual, yaitu yang memiliki kemampuan menggunakan dua bahasa (bilingual) atau multilingual (lebih dari dua) secara bergantian untuk kepentingan komunikasinya. Untuk melihat penyebaran dan pemakaian bahasa daerah di Provinsi Banten, dapat dilihat tabel berikutini.

Peta pemakaian Bahasa Daerah di Provinsi Banten

Bahasa	Wilayah
Bahasa Sunda	Pandeglang dan Lebak, dan sebagian Kabupaten Tangerang
Bahasa Jawa dialek Banten	Serang, Cilegon, dan sebagian Kabupaten Serang
Bahasa Indonesia dialek Betawi	Kota Tangerang, Tangerang Selatan, dan sebagian Kabupaten Tangerang

Berkaitan dengan paparan di atas, ketika berbicara bahasa dalam skala lokal, apakah keberadaan bahasa daerah telah pula mendapat “tempat” di hati masyarakat penuturnya? Kenyataan yang terjadi, hampir di setiap daerah yang ada di Indonesia keberadaan bahasa daerah semakin terabaikan bahkan mungkin semakin terpinggirkan. Keberadaan bahasa daerah saat ini “digempur” habis-habisan oleh dominasi bahasa nasional dan bahasa asing. Situasi seperti itu menjadi fenomena yang umum di setiap daerah di Indonesia meskipun beberapa daerah ada yang telah membuat peraturan daerah (perda) tentang bahasa daerahnya.

#### **BAHASA INDONESIA DAN BAHASA DAERAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG BAHASA NOMOR 24 TAHUN 2009**

Dalam rangka membina dan mengembangkan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa menerbitkan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan.

Dalam undang-undang kebahasaan tersebut, dibahas mengenai kedudukan dan fungsi serta pembinaan bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Salah satu pasal dalam undang-undang tersebut (pasal 29 ayat 1) menjelaskan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Hal ini sejalan dengan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia seperti tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab XV pasal 36 yang mengindikasikan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan dari mulai taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi kecuali lembaga pendidikan yang menyelenggarakan bahasa asing, boleh tidak memakai bahasa pengantar bahasa Indonesia.

Sementara itu, mengenai keberadaan bahasa daerah, pemerintah sudah mengatur mulai pasal 37 sampai dengan pasal 45. Salah satu pasal yang membahas mengenai bahasa daerah, yaitu pasal 42 (ayat 1-3). Dalam pasal tersebut (ayat 1) dinyatakan sebagai berikut.

*“Pemerintah daerah wajib mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia”.*

Merujuk pada pasal tersebut, sudah jelas bahwa ada kewajiban moral yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah yang bekerja sama dengan pemangku kebijakan yang lain seperti dinas pendidikan provinsi dan balai bahasa untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam rangka pengembangan dan pembinaan bahasa daerah sehingga bahasa daerah tetap terjaga dan memiliki jati diri di daerahnya masing-masing. Salah satu contoh konkret misalnya, memasukkan bahasa daerah dalam materi muatan lokal di sekolah-

sekolah berdasarkan masing-masing wilayah (geografi). Misalnya, Kab. Lebak dan Pandeglang memasukkan bahasa Sunda dalam Muloknya, Kota Cilegon, Serang, dan Kabupaten Serang memasukan bahasa Jawa, Tangerang Kota, Tangerang Selatan, dan Kab. Tangerang memasukkan bahasa Betawi (Indonesia dialek Betawi). Dengan demikian, keberadaan bahasa daerah tetap terjaga dan tidak punah. Selain itu, menanamkan sikap positif para siswa terhadap bahasa daerahnya masing-masing.

Kenyataan yang terjadi di kota dan kabupaten di Provinsi Banten, melalui kebijakan yang diambil oleh pemangku kepentingan banyak terjadi salah persepsi mengenai pembelajaran Muatan Lokal (Mulok). Pembelajaran muatan lokal di sekolah bukan diarahkan pada pembelajaran bahasa daerah masing-masing wilayah justru diarahkan pada mata pelajaran yang lain yang secara kompetensi sudah dipelajari pada mata pelajaran yang lain pula. Selain itu, alasan ketiadaan guru bahasa daerah yang menyebabkan pembelajaran muatan lokal diarahkan pada mata pelajaran yang lain. Faktor yang lainnya lagi diantaranya sarana dan prasarana termasuk ketersediaan bahan ajar dan buku ajar.

#### **PETA PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA DAN BAHASA DAERAH DI PROVINSI BANTEN**

Seperti telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa berbicara mengenai keberadaan pendidikan bahasa Indonesia dan daerah di Provinsi Banten tidak akan pernah lepas dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

Jika merujuk pada pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab XV pasal 36 yang menjelaskan tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan Undang-Undang Bahasa Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 25 yang menjabarkan bahasa Indonesia dijadikan bahasa pengantar dalam

lembaga pendidikan, kegiatan pembelajaran di sekolah dari tingkat taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi wajib menggunakan bahasa Indonesia dalam pengantarnya. Atau, jika ditapsirkan lebih jauh, dalam pembelajaran di kelas, selain pembelajaran bahasa daerah dan bahasa asing, wajib menggunakan bahasa Indonesia.

Berkaitan dengan paparan di atas, muncul sebuah pertanyaan, bagaimana pendidikan bahasa Indonesia dan bahasa daerah di Provinsi Banten? Berdasarkan beberapa literatur ataupun penelitian yang dilakukan oleh dosen serta pemerhati bahasa di Provinsi Banten, ditengarai bahwa pembelajaran pendidikan bahasa Indonesia di sekolah masih jauh dari tujuan dari pendidikan bahasa Indonesia tersebut, yaitu bahasa dijadikan sebagai jatidiri bangsa/penutur, menumbuhkan rasa kebanggaan pada siswa dengan keberadaan bahasa Indonesia, siswa memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia, dan yang terakhir menjadi lambang identitas nasional seperti halnya terhadap lambang negara dan bendera. Kenyataan yang terjadi, siswa enggan menggunakan bahasa Indonesia, baik dalam konteks formal maupun nonformal. Mereka (baca: siswa) lebih suka menggunakan bahasa gaul (prokem dan alay) ataupun bahasa asing dalam percakapan dengan temannya. Demikian pula ketika mereka bercakap-cakap dengan gurunya. Karena faktor kebiasaan terkadang siswa menerabas norma-norma penggunaan bahasa atau norma-norma komunikasi. Selain faktor siswa yang menyebabkan pembelajaran pendidikan bahasa Indonesia di sekolah kurang berhasil, ada kemungkinan faktor guru, sarana, dan media pembelajaran yang lain.

Secara umum hal di atas disebabkan beberapa faktor, antara lain (1) secara kemampuan linguistik, harus diakui bahwa sumber daya manusia (baik guru maupun siswa) dalam hal penggunaan bahasa Indonesia masih rendah apalagi mereka yang berada jauh dipelosok-pelosok Banten. Ketika proses pembelajaran berlangsung banyak di-

gunakan bahasa daerah. Padahal, bukan saatnya pelajaran bahasa daerah. Masih rendahnya kemampuan tersebut ditandai dengan seringnya guru dan murid menggunakan bahasa daerah dalam proses pembelajaran dengan alasan tidak menemukan padanan kata dalam bahasa Indonesia. Hal ini akan mengakibatkan gejala campur kode (campur bahasa) dan alih kode (alih Bahasa) bahkan yang bersifat mengacaukan struktur bahasa Indonesia, yaitu gejala Interferensi. Alasan lainnya siswa tidak paham ketika guru menjelaskan materi dengan menggunakan bahasa Indonesia, yang berikutnya adalah karena faktor kebiasaan menggunakan bahasa daerah dalam konteks komunikasi sehari-hari sehingga terbawa dalam proses pembelajaran di kelas; (2) pembelajaran pendidikan bahasa Indonesia hanya berorientasi pada khazanah teoretis tidak pada tataran praktis sehingga secara kemampuan komunikatif, kemampuan siswa masih rendah bahkan tidak jarang ditemukan di sekolah menengah pertama pun masih ada siswa yang belum bisa membaca bahkan untuk tampil sekadar bercerita di depan kelas pun tidak mampu; (3) harus diakui faktor ketersediaan buku sumber menjadi salah satu penyebab ketidakberhasilan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah-sekolah apalagi mereka (sekolah) yang berada jauh dari pusat pemerintahan Provinsi Banten/ibu kota kabupaten, pasti akan merasakan hal ini karena siswa hanya terpaku pada buku sumber yang diberikan oleh guru; (4) faktor guru bahasa Indonesia juga dapat menyebabkan pendidikan bahasa Indonesia tidak berhasil, misalnya ditinjau dari segi kreativitas guru, penggunaan model-model pembelajaran, pola; (pendekatan pembelajaran terhadap siswa dan sebagainya; (5) harus ada kesepahaman antara antarpihak-pihak terkait dalam hal ini pemangku kepentingan yang berkaitan dengan keberadaan bahasa Indonesia di Provinsi Banten; dan (6) harus sering diadakan kegiatan-kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan pendidikan bahasa Indo-

nesia yang merata, dalam pengertian semua guru bahasa Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama.

Sementara itu, berkaitan dengan pembelajaran bahasa daerah di Provinsi Banten, ada sebuah kenyataan yang sangat menyedihkan bahwa pembelajaran bahasa dan sastra daerah di sekolah dewasa ini masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Kondisi pembelajaran bahasa dan sastra daerah saat ini di Banten masih sangat jauh dari harapan dan belum juga mengalami kemajuan yang berarti, tetap terpinggirkan, bahkan seolah-olah terasingkan dari komunitasnya sendiri.

Merujuk pada pemetaan penyebaran bahasa daerah di wilayah provinsi Banten seperti yang telah penulis paparkan di atas, idealnya pemangku kebijakan di masing-masing wilayah merumuskan sebuah kebijakan yang mendukung keberadaan bahasa daerah di masing-masing wilayah tersebut. Dengan demikian, keberadaan bahasa daerah di sekolah-sekolah di Provinsi Banten tidak menjadi terpinggirkan atau dipandang sebelah mata. Padahal, pembelajaran bahasa dan sastra daerah sangat penting diberikan kepada siswa dalam upaya pembentukan kepribadian, pengembangan rasa, cipta, dan karsa, dan keterampilan hidup (*life skill*) sebagai hasil samping pembelajaran. Melalui pembelajaran bahasa dan sastra daerah, siswa diharapkan tumbuh menjadi manusia yang berkepribadian luhur, halus budi pekertinya, tinggi rasa kemanusiaannya, dan peka akan apresiasi budayanya sehingga mampu menyalurkan gagasan, imajinasi dan ekspresinya serta menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Menilik dan mencermati kondisi pembelajaran bahasa dan sastra daerah yang demikian itu, sangat wajar jika pelaksanaan pembelajaran bahasa daerah di Provinsi Banten semakin hari semakin merosot bahkan mungkin suatu saat kelak orang Banten tidak mengenal bahasanya sendiri dan pada akhirnya terjadi kepunahan bahasa (*language death*).

Berdasarkan paparan tersebut, ada beberapa hal yang menurut hemat penulis harus segera dilakukan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Banten agar keberadaan bahasa daerah tidak punah, dapat menumbuhkan kecintaan masyarakat/siswa terhadap bahasa daerahnya, dan melestarikan budaya daerah, yaitu sebagai berikut.

1. Harus ada kesepahaman mengenai pemahaman budaya daerah yang lebih memprioritaskan pembelajaran bahasa daerah sebagai sarana untuk belajar moralitas, filosofis, dan akseptabilitas sosial.
2. Pengajaran bahasa daerah membutuhkan infrastruktur bahasa (daerah) standar yang mapan maka perlu diseminarkan dan dilokakaryakan pada daerah masing-masing, bahan ajar yang sesuai, analisis kebutuhan dan kondisi daerah, serta kuantitas dan kualitas tenaga kependidikan untuk tingkat pendidikan formal (TK, SD) dan sektor nonformal.
3. Pemerintah daerah harus menerbitkan kebijakan bahasa (*language policy*) terhadap bahasa-bahasa yang ada di wilayahnya dengan mempertimbangkan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.
4. Memperlakukan komponen bahasa sebagai bagian dari budaya daerah dijadikan sebagai komoditas budaya.
5. Pemerintah daerah dalam hal ini provinsi ataupun kabupaten/kota harus melakukan kaji ulang terhadap analisis kebutuhan yang sesuai dengan kondisi daerah dan bahan ajar muatan lokal yang sesuai di daerah dengan mengelola perbedaan sebagai realitas budaya yang memperkaya kebudayaan nasional serta sebagai fasilitator bagi penyediaan infrastruktur mapannya bahasa daerah; termasuk di dalamnya pembinaan terhadap bahasa-bahasa daerah yang hampir punah.
6. Menghidupkan kembali filosofis kearifan lokal, karakteristik, dan jatidiri daerah sebagai lambang kebanggaan daerah dan

nasional dalam memperkaya khazanah keindonesiaan.

7. Pemetaan bahasa dan sastra daerah, yang di dalamnya dapat juga berupa peta sosial budaya, ekonomi, politik dan pemerataan hasil-hasil pembangunan yang telah, sedang, dan akan dilakukan Pemerintah daerah;
8. Pemetaan sosial budaya, ekonomi, dan pembangunan dapat menjadi jendela dunia dan sarana promosi daerah dalam era globalisasi dan perdagangan bebas, serta peningkatan sumberdaya manusia dalam pergaulan, baik nasional maupun internasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan (Ed.). 2011. *Politik Bahasa*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.
- Arifin, Zaenal. 2004. *Cermat Berbahasa Indonesia di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Akapres.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2011. *Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan*. Jakarta: Kemdikbud.
- Halim, Amran (Ed.). 1980. *Politik Bahasa Nasional I*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Halim, Arman (Ed.). 1984. *Politik Bahasa Nasional 2*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Haugen, Einar. 1972. *Bilingualisme in the American: A Bibliography and Research Guide*, Alabama: University of Alabama Press.
- Muslich, Masnur dan I Gusti Ngurah Oka. 2010. *Perencanaan Bahasa di Era Globalisasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suwito. 1983. *Pengantar Anal Sosiolinguistik, Teori dan Problema*. Edisi Kedua. Surakarta: Henari Offset Solo.
- Tarigan, H.G. dan Tarigan, Djago. 1995. *Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa*, Bandung: Angkasa
- Tim Dosen MKU. 2006. *Bahasa Indonesia*. Serang: Untirta
- Weinreich, Uriel. 1970. *Language in Contact: Finding and Problem*. The Hague-Paris: Mouton.